Bagaimana Kemiskinan di Malinau bisa dipantau?

Kabar dari

TIM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA

HULU SUNGAI MALINAU

No. 21, April 2005

Pemerintah Kabupaten Malinau punya peluang besar untuk mengatasi kemiskinan di daerah Malinau. Pemkab dapat lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan jika membuat keputusan dan program pembangunan berdasarkan informasi dari tingkat desa dan dampak program Pemkab sendiri.

Oleh karena itu, CIFOR sedang bekerjasama dengan Pemkab Malinau untuk mengembangkan sistem Pemantauan Kemiskinan, atas kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Badan Pusat Statistik. Program "Kemiskinan dan Desenstralisasi" ini akan mendukung Pemkab Malinau untuk mengembangkan survey desa-desa di Kabupaten Malinau.

Setelah survey pertama pada bulan November 2003, sebagai langkah berikut dari program ini, CIFOR mendampingi lokakarya "**Kelompok Kerja Pemantauan Kemiskinan**" yang diadakan di Derawan pada tanggal 7-11 Maret 2005. Hasilnya dilaporkan dalam surat kabar ini.

Pada tanggal 7-11 Maret 2005 tujuh staf Pemerintah Kabupaten Malinau dan mitra dari CIFOR mengadakan pertemuan untuk mengembangkan indikator dan sistem pemantauan kemiskinan untuk Kabupaten Malinau. Lokakarya ini adalah kegiatan pertama dari tahap implementasi program “Kemiskinan dan Desentralisasi” di mana Pemkab didukung untuk mengetahui kondisi kemiskinan dan dampak program Pemkab terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tujuan lokakarya ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan set indikator kemiskinan
2. Merancang sistem pemantauan untuk Malinau
3. Membangun semangat tim dan untuk lebih saling mengenal

Tujuan di atas dicapai melalui serangkaian pembahasan dan latihan yang diikuti secara serius oleh kelompok tersebut. Lokakarya ini sangat produktif dan para anggota tim berhasil membangun suasana yang sangat bersahabat dan akrab mengedepankan kebersamaan.

Pada lokakarya ini telah dihasilkan beberapa keputusan yang akan disampaikan kepada Pemkab untuk minta dukungan.

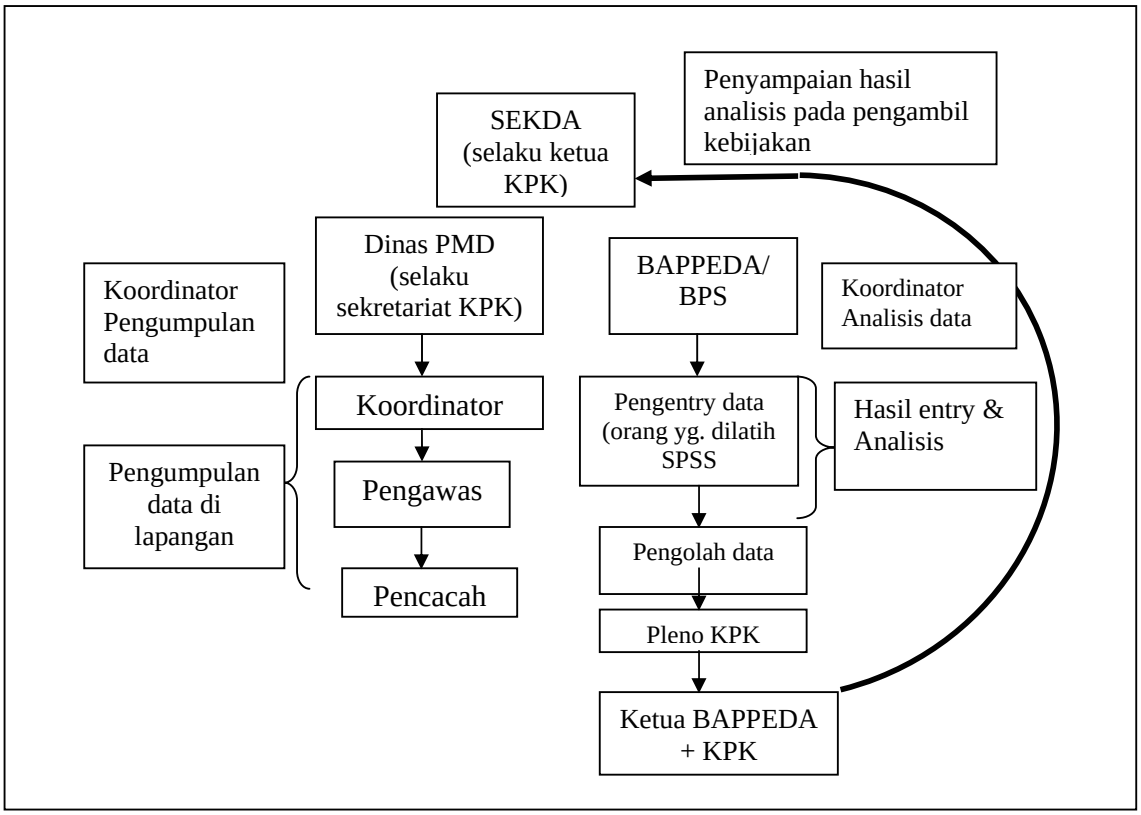
Tujuan pemantauan: Untuk memantau tingkat kemiskinan guna memperoleh informasi mengenai dampak program Pemkab dan memberikan masukan untuk program tersebut.

Lingkup: Kabupaten, dengan keterwakilan dari semua keluarga dan desa

Pengambilan sampel: Sampel akan diambil untuk mewakili semua desa dan keluarga di desa dengan menggunakan metode sampling gugus (*cluster*) dan berjenjang (*stratification*) yang acak. Unit sampel adalah keluarga, diwakili oleh kepala keluarga. Seorang konsultan statistik akan dilibatkan untuk membuat rekomendasi tentang metode yang tepat agar semua desa dan keluarga terwakili dengan cara yang paling efisien untuk menekan kebutuhan tenaga dan anggaran.

Organisasi: Tim akan terdiri dari pegawai dari berbagai instansi pemerintah (termasuk pejabat dan pegawai lapangan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesehatan, Pendidikan Nasional, Kehutanan dan Perkebunan, Pertanian. Sekretaris Daerah (Sekda) akan membawahi tim tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan kantor daerah Badan Pusat Statistik akan memainkan peran penting dalam pelaksanaan berbagai bagian program. Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) kabupaten akan bertugas mengkoordinasikan kegiatan dari seluruh badan yang terlibat (lihat gambar 1).

Gambar 1: Rancangan sistem penanggung-jawab dan pelaksana pemantauan kemiskinan di Kabupaten Malinau

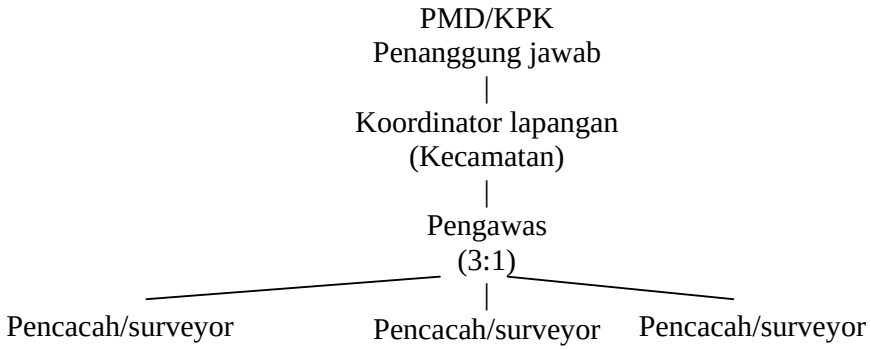


Tiga langkah berikut diperlukan agar sistem pemantauan berhasil:

1. Pengumpulan data lapangan
2. Analisis
3. Penggunaan data oleh para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan

Pengumpulan data lapangan akan dikoordinasi oleh Dinas PMD selaku sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan. Pengumpulan data di lapangan akan dilakukan oleh pencacah. Setiap tiga pencacah akan dikontrol oleh satu orang pengawas, untuk menjaga mutu pengambilan data. Kegiatan lapangan akan dikoordinasi oleh seorang koordinator di setiap kecamatan (lihat gambar 2). Tenaga akan direkrut secara perorangan dari tingkat desa dan kecamatan, dari pegawai yang ada di Malinau (pegawai Kabupaten, Kecamatan, PPL Pertanian, Mantri Statistik, Petugas Kesehatan, PKK, Posyandu). Tim pelatih akan dipimpin oleh PMD/KPK. BAPPEDA akan membantu dalam hal substansi angket dan BPS dalam hal teknik statistik dan metode lapangan. CIFOR akan membantu dalam beberapa uji coba awal.

Gambar 2: Pembagian tugas pengumpulan data di lapangan



Pemasukan dan analisis data: BPS akan mengawasi pemasukan data dan memeriksanya serta, bersama-sama BAPPEDA, bertanggung jawab atas analisisnya. Pemasukan data akan dilakukan oleh pegawai yang telah dilatih. Hasil analisis akan dibahas di pleno KPK untuk menghasilkan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. CIFOR akan membuat formulir yang sesuai dengan keperluan. Untuk pengolahan data digunakan program komputer SPSS.

Kualitas data akan dipertahankan melalui

- Pengecekan lapangan setiap malam oleh pengawas tim selama kunjungan desa
- Pengkajian ulang atas angket (dicek dua kali) oleh petugas yang memasukkan data
- 5% pemasukan data angket akan diperiksa setelah pemasukan data keseluruhan selesai.

Analisis akan meliputi penentuan:

- Tingkat kemiskinan keluarga, desa, kecamatan dan kabupaten
- Siapa yang miskin: apa karakteristik keluarga dan desa miskin?
- Karakteristik kemiskinan: berdasarkan sektor, inti dan konteks: termasuk rata-rata, kisaran dan distribusi (frekuensi)
- Hubungan antara program Pemkab dan sasarannya dengan tingkat dan karakteristik kemiskinan
- Hubungan antara anggaran program dengan tingkat dan karakteristik kemiskinan.

Skor akan diurutkan dari 1 sampai 10; skor 10 menunjukkan kemakmuran.

Upaya akan dilakukan untuk tidak hanya melihat sasaran fisik, tetapi juga kualitas hasil program dan dampaknya bagi keluarga.

Dua uji coba akan dilakukan (masing-masing selama dua minggu), satu pada bulan Mei dan satu pada Juli 2005. Sebelum uji coba akan diadakan pelatihan. Uji coba akan diadakan di delapan desa dari empat kecamatan akan dilibatkan, yaitu Malinau Kota, Malinau Utara, Sungai Boh dan Kayan Hulu atau Pujungan.

Uji coba pertama akan menggunakan dua kuesioner dengan sebagian indikator yang berbeda tetapi saling melengkapi untuk area kota dan area terisolir. Uji coba kedua akan menguji satu kuesioner dengan indikator yang seragam untuk semua daerah.

Anggaran untuk uji coba pertama diperkirakan sekitar 50 juta rupiah. CIFOR menanggung biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, materi dan pelatihan. Pemkab akan menanggung lumsum untuk staf Pemkab yang terlibat di dalam uji coba. CIFOR bersama KPK akan mengajukan permohonan kepada para pimpinan Pemkab untuk menanggung lumsum tersebut.

Indikator
Target: 25 sampai 35 indikator
Diambil dari lokakarya bulan Desember 2004 di Malinau, set indikator umum berdasarkan survei 2003 dan disempurnakan di Kutai Barat, dan akan dikaitkan dengan AKU, ABK dan RPJM.

Dua puluh lima (25) indikator hasil uji coba pertama di Kabupaten Kutai Barat telah dibahas oleh tiga kelompok. Tabel berikut merangkum rekomendasi dari ketiganya, termasuk beberapa indikator tambahan. Indikator-indikator itu perlu dihubungkan dengan proses perencanaan (ABK, Renstra) dan semua sektor harus dipastikan terwakili secara merata. Pertanyaan yang didasarkan pada indikator ini akan dikembangkan lebih lanjut oleh CIFOR (termasuk pembobotannya), dan akan disebarkan ke anggota tim untuk mendapatkan komentar dan perbaikan.

No	Indikator	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Catatan
1	Konsumsi protein	ya	ya	ya	Gabung 1 dan 2. * konsumsi karbohidrat, protein, vitamin
2	Kekurangan makanan (nasi atau protein)	ya	-	ya	
3	Penyakit serius pada anggota rumah tangga	?	ya	ya	
4	Kondisi rumah	ya	ya	ya	(2) ada perbedaan kota – desa
5	Pemilikan materi (Sepeda motor atau ketinting)	ya	ya	ya	(2) ketinting di desa/sepeda motor di kota
6	Pemilikan materi (gergaji mesin / kulkas)	ya	ya	ya	(2) gergaji mesin di desa/ ? di kota
X 7	Rasa takut (pada	ya	-	-	

No	Indikator	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Catatan
	kekerasan atau kriminal lainnya)				
8	Kesejahteraan secara subyektif (kepuasan)	ya	ya	-	* masuk
X 9	Penghormatan diri	ya	-	-	(1) harga diri
10	Pendidikan formal orang dewasa	ya	ya	ya	(1) coret formal
11	Sekolah anak-anak	ya	ya	ya	(1) buku ada/guru ada, (2) ketersediaan sarana pendidikan
12	Pengetahuan informal anggota rumah tangga	-	ya	ya	* masuk
13	Kondisi hutan	ya	ya	-	Di tingkat desa (2) lingkungan di kota (pencemaran), * harus membedakan desa-kota
X 14	Pengambilan sumber daya secara ekstrem	ya	-	-	Di ukur di tingkat desa (3)?
X 15	(keanekaragaman hayati) Keberadaan enggang	-	ya	-	Di ukur di tingkat desa (3)?
16	Tingkat gotong-royong	ya	ya	-	Di ukur di tingkat desa (3)?
X 17	Rasa saling percaya	-	-	-	Di ukur di tingkat desa (3)?
18	Resolusi konflik	ya	ya	-	Di ukur di tingkat desa (3)? (2) intensitas konflik
19	Sumber pendapatan alternatif	ya	ya	ya	
20	Investasi	ya	ya	ya	(2) harta: kebun, gilingan, rumah kedua
21	Tabungan	ya	-	ya	* kepemilikan barang yang mudah dijual/diuangkan
22	(keamanan ekonomi) ketersediaan beras	ya	ya	ya	3 + 2 + (1) kemudahan dapat sembako (2) + singkong
23	Keikutsertaan dalam pengambilan keputusan kampung	?	-	ya	* Masuk uji coba I
24	Rasa aman terhadap penguasaan lahan	ya	ya	-	* Masuk uji coba I
X 25	Penggunaan aturan internal lokal	ya	-	-	

X berarti indikator tersebut tidak digunakan
* berarti indikator tersebut digunakan

Indikator Tambahan:

- 19. Perjalanan ke Malinau (keberadaan jalan dan transportasi umum)
- 20. Gunakan TV/Radio/Koran/surat Pemkab (2+3)

- 21. Puskesmas dan pelayanan (1)
- 22. WC (2+3)
- Keterjangkauan SMP (< 1 jam) (tergabung dalam indikator 11 di tabel)
- 23. Kematian bayi dan ibu
- Kehadiran di sekolah (tergabung dalam indikator 11 di tabel)
- 24. Luas lahan produktif dan lahan tidur (produksi pertanian)
- Konsumsi: karbohidrat, protein, vitamin (tergabung dalam indikator 1+2 di tabel)
- 25. Sandang: berapa kali/tahun beli pakaian

Hasil

- Data untuk digunakan oleh PMD, KPK, BAPPEDA, BPS
- Peta yang menunjukkan tingkat kemiskinan di setiap desa berdasarkan "lampu lalu lintas" merah, kuning atau hijau
- Perda tentang pengentasan kemiskinan, disusun oleh KPK dan badan-badan terkait (awal 2006).
- Sistem pemantauan untuk kabupaten (dibuat menjadi Perda dan di-SK-kan untuk implementasinya) untuk digunakan di masa datang

Meta monitoring

Proses pembelajaran dari tim pemantauan dan pengembangan sistem pemantauan akan dipantau dan dievaluasi tersendiri (*meta-monitoring*). Tujuan meta-monitoring adalah untuk secara terus-menerus memperbaiki sistem pemantauan sampai tercipta suatu sarana yang memenuhi semua kebutuhan dan menarik bagi para pengguna. Misalnya tim monitoring akan mengevaluasi pelaksanaan uji coba pertama pengumpulan data di lapangan.

Rencana akhir meta-monitoring akan dikembangkan oleh CIFOR sebagai bagian dari peran penelitiannya.

Aspek Pemantauan	**Indikator**	**Verifikator**
Mandat dari Bupati	Dokumen ada	Dokumen yang mendukung tim Angket disetujui
Mandat dari Kepala Dinas PMD	Dokumen ada Dukungan setiap hari (staf lain mengakui peran PKK - Pemantauan Kelompok Kerja) Partisipasi anggota PKK	Salinan dokumen Observasi langsung
Diterima oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*): Bupati, Sekda, DPRD Tokoh agama Tokoh masyarakat STIE Organisasi Pemuda LSM	Surat Lokakarya umum Uji coba	Salinan dokumen Observasi langsung
Persetujuan di kalangan anggota PKK	Level konflik Ketidaksepahaman Keluhan	Observasi langsung Notulen rapat

Aspek Pemantauan	Indikator	Verifikator
Partisipasi anggota PKK	Partisipasi dalam rapat Partisipasi dalam aktivitas pemantauan Partisipasi dalam evaluasi	Observasi langsung Notulen rapat
Sosialisasi dengan masyarakat setempat	Indikator yang diusulkan oleh masyarakat setempat dibahas Indikator yang diusulkan oleh masyarakat setempat diterapkan	Observasi langsung Notulen rapat
Kesadaran para pemangku kepentingan yang lain tentang sistem pemantauan - Pemkab - Masyarakat setempat - LSM - UnMul	Mendengar tentang pemantauan Mengetahui pendekatan dan tujuannya	Evaluasi setelah penyelesaian program
Perubahan persepsi tentang kemiskinan/kesejahteraan di kalangan para pemangku kepentingan	Diskusi atas inisiatif sendiri mengenai indikator lain BPS/BKKBN Pembangunan atas inisiatif masyarakat Diskusi atas inisiatif sendiri mengenai SLA	Evaluasi setelah penyelesaian program
Kapasitas untuk mengukur dan mengidentifikasi indikator	Kriteria cocok dengan kriteria yang telah disetujui	Analisis kriteria
Kecocokan indikator di tingkat daerah	Kebingungan Kesalahpahaman	Observasi langsung selama uji coba pemantauan; Refleksi setelah uji coba pemantauan
Sumber informasi yang memadai di tingkat daerah	Responden tidak menolak berpartisipasi	Refleksi setelah pemantauan
Waktu pemantauan memadai	Waktu per desa memadai	Refleksi setelah pemantauan
Anggaran	Jumlah Orang – hari	Laporan PKK
Pemilihan desa	Beberapa aspek kemiskinan terwakili (jumlah penduduk, jarak dari pusat kabupaten, data yang valid)	Rencana pemantauan
Kapasitas analitis/Memaknai hasil pemantauan	Kontradiksi ditangkap Pemasukan data benar Data logis (lihat rantai sebab akibat) Kesimpulan berdasarkan data	Perbandingan data dengan laporan
Memperbaiki indikator/proses pembelajaran	Waktu yang diperlukan untuk merenungkan pelajaran yang diperoleh	Catatan rapat

Rencana Kerja

Kegiatan	Siapa	Waktu	Catatan
Buat Laporan Pertemuan Derawan	CIFOR	30/3/2005	
Buat kuesioner	CIFOR	Pertengahan April	Beri panduan bagi

Kegiatan	Siapa	Waktu	Catatan
		2005	Pemkab bagaimana membuat kuesioner
Hubungi konsultan untuk pengambilan sampel	CIFOR	Pertengahan April 2005	
Memilih tim uji coba	KPK/PMD	Minggu ke-3 April 2005	
Persiapan pelatihan tim	KPK/PMD	April 2005	
Pelaksanaan pelatihan tim	KPK + CIFOR + staf BPS	Awal Mei 2005	Ruang pertemuan Pemkab
Melobi Pemkab untuk anggaran (SPPD)	KPK + CIFOR (Ketua BAPPEDA)	Awal Mei 2005	Laporan disampaikan oleh CIFOR + KPK
Membahas kuesioner	Tim	Akhir April 2005	
Uji Coba I (2 kuesioner/8 desa)	CIFOR + KPK	Minggu ke-3 Mei 2005	
Pengolahan data uji coba I	BAPPEDA + BPS, PMD	Awal Juni 2005	
Evaluasi uji coba I	Tim	Minggu ke-3 Juni 2005	
Sosialisasi Tim SKM	KPK	April 2005	
Mandat Bupati Tim SKM	KPK	April 2005 (akhir)	SK Bupati
Pembuatan Perda Penanggulangan Kemiskinan	KPK + Bagian Hukum	Juni 2005	Draf Naskah
Persiapan kuesioner untuk uji coba II	Tim	Awal Juli 2005	
Uji Coba II (1 kuesioner)	Tim	Juli 2005	Termasuk pelatihan tim
Pengolahan data uji coba II	BAPPEDA + BPS + PMD	Minggu ke-3 Juli 2005	
Evaluasi uji coba II	Tim	Awal Agustus 2005	Rekomendasi

CIFOR bisa dihubungi di lapangan di Desa Long Loreh, Malinau Kota dan Stasiun Seturan.

Di Malinau:
Jl. Raja Pandita
Teluk Sanggan
Malinau
Tel: 0553-21559

Atau di Bogor:
Jl. CIFOR, Situgede
Sindang Barang
Bogor 16680
Telp. (0251) 622-622
Fax. (0251) 622-100
E-mail: cifor@cgiar.org

Atau lewat surat:
CIFOR
PO Box 6596 JKPWB
Jakarta 10065